

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN  
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN APBD DENGAN KOMITMEN  
ORGANISASI**

**(STUDY EMPIRIS PADA DPRD KABUPATEN SIDOARJO)**

**Renny Wahyu Mashyithoh**

**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE Mahardhika**

**Surabaya, Jawa Timur**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan keuangan APBD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating pada DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan survey secara langsung dan instrumen penelitian yang digunakan adalah menggunakan angket (kuesioner). adapun desain penelitian yang digunakan adalah survey. Selanjutnya agar tujuan penelitian dapat dicapai, maka data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang diperoleh dengan menggunakan bantuan software SPSS 21.0 for windows. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian anggaran yang berjumlah 30 Anggota. Berdasarkan hasil dari uji t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 kemudian pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi ternyata signifikan dengan tingkat signifikansi 0,001 kurang dari  $\alpha$  0,05. maka H1 dan H2 diterima dan H0 ditolak. Artinya ada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan APBD.

**Kata kunci : Pengetahuan Dewan, Pengawasan keuangan, Komitmen Organisasi dan Variabel Moderating**

## **ABSTRACT**

*This study was conducted to determine the effect of the Council's Knowledge About the Budget Against Financial Supervision of The Regional Budget with Organizational Commitment as a Moderating Variable in the Sidoarjo Regency DPRD. In this study the process of collecting data using direct surveys and research instruments used were using a questionnaire. As for the research designed used is a survey. Furthermore, so that research objectives can be achieved, the data are collected by questionnaire method. Data analysis was performed using simple regression analysis obtained using SPSS 16.0 software for windows. The population and sample in this study are members of the Sidoarjo Regency DPRD with a budget of 50 Members. Based on the result of the test table 2.04841 with a significance level of 0.000 less than  $\alpha$  0.05 the board's knowledge of the budget and organizational commitment turned out to be significant with significance level of 0.001 less than  $\alpha$  0.05 then H1 and H2 are accepted and H0 rejected. This means that there is influence of the council's knowledge of the budget on the financial supervision of the regional budget.*

**Keyword : Organizational Commitment, Budgeting Knowledge Council, Financial Control Area, the role of Regional parliament**

## **I. PENDAHULUAN**

Perekonomian suatu daerah perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah demi mewujudkan perekonomian daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Seiring dengan peranan Pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerahnya sendiri dalam upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan setiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah dengan maksimal, agar tidak terjadi krisis moneter yang menyebabkan kondisi

perekonomian menjadi tidak stabil. Pengurusan keuangan di pemerintah daerah diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan daerah, keuangan pemda, dimana ada satu pihak yang memberikan gambaran mengenai perkiraan pengeluaran dalam membiayai kegiatan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran (Halim, 2014 : 35).

Pentingnya peranan semua pihak dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat. Setiap anggota dewan harus berperan dalam melaksanakan tugas, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Komitmen keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat diperlukan agar *good governance* dapat terwujud dan berjalan dengan baik (Mayasari: 2012). Adanya komitmen organisasi dalam pengawasan APBD merupakan indikator mewujudkan *good governance*. Dalam hal ini berkaitan dengan kinerja anggota dewan di DPRD, komitmen organisasi sangat perlu untuk pengawasan APBD yang baik. Pengawasan yang dilakukan harus dimulai sejak tahap perencanaan anggaran, pengesahan, pelaksanaan serta pelaporan. Namun anggota DPRD harus memahami bahwa pengawasan terhadap eksekutif daerah sebatas pengawasan bukan pemeriksaan. Pentingnya pengawasan APBD dalam menangani kecurangan dalam penggunaan dana. Dana yang ada harus dialokasikan secara maksimal demi kepentingan rakyat tanpa adanya unsur kecurangan. Pengawasan APBD secara maksimal dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam lingkup pembangunan satu wilayah. Pembangunan beberapa fasilitas umum seperti jalan, jembatan maupun lainnya membutuhkan penilaian secara bijak dari pemerintah agar dalam

penyusunan anggaran sesuai dengan realisasinya. Dengan Otonomi daerah proyek pembangunan wilayah dapat di handle penuh oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat rawan terhadap kepentingan kelompok yang memanfaatkan anggaran sebagai umpan untuk tindakan berbagai kecurangan. Keterlibatan anggota dewan dalam pengawasan anggaran daerah sebagai controlling yang benar dan memberikan kontribusi untuk upaya mewujudkan pemerintah daerah yang terbuka (Coryanata : 2011).

Pentingnya pengetahuan anggaran bagi setiap anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan APBD. Apabila semua anggota dewan sudah mempunyai pengetahuan anggaran maka pengawasan dapat terlaksana secara maksimal. Pengetahuan anggaran sangat diperlukan untuk pengawasan APBD dapat terlaksana secara terbuka. Anggota dewan harus mampu memahami substansi dan arah kebijakan yang terdapat dalam APBD. Yudoyono dalam Coryanata (2011) DPRD bisa menggunakan hak-haknya sesuai aturan, melaksanakan tugas dan kewajiban serta menyesuaikan jabatannya secara profesional, apabila setiap anggota mempunyai pengetahuan dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

Pentingnya komitmen organisasi dalam peningkatan kinerja anggota dewan. Setiap anggota dewan diharapkan mempunyai komitmen organisasi yang tinggi sehingga kinerja anggota dewan dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat. Kinerja anggota dewan dalam pengawasan APBD dapat terwujud secara optimal jika didukung adanya komitmen semua individu dalam organisasi. Menurut Robbins (2014) Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual saat menjalankan operasional organisasi. Anggota dewan akan menggunakan pengetahuan anggaran yang

dimiliki dalam melakukan pengawasan apabila anggota dewan tersebut mempunyai komitmen organisasi yang tinggi.

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengelolaan Keuangan daerah**

Halim (2013:180) menyatakan bahwa setelah lima tahun mengupayakan berbagai usaha reformasi di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dimaksud, pada tahun 2003 dihasilkan satu paket perundang-undangan yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang yang terkait dengan ketiga undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, kemudian menyusul seperti UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan pasal 42 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

### **2. Fungsi dan Tugas DPRD**

#### **a. Fungsi DPRD**

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 pasal 365 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD

mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat :

1. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
2. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
3. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

#### b. Tugas dan Wewenang DPRD

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 366 tentang tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota:

1. Bertugas dalam membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
2. Bertugas dalam memberikan pelayanan terbaik seperti dalam hal pemberian persetujuan mengenai rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.
3. Bertugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten/kota.
4. Bertugas dalam melaksanakan kegiatan perekrutan dan pemberhentian tugas bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui peran gubernur untuk mendapatkan pengesahan perekrutan dan/atau pemberhentian.
5. Bertugas dalam memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi ketiadaan jabatan wakil bupati/wakil walikota.

6. Bertugas dalam memberikan pendapat dan pertimbangan dalam mengambil keputusan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap suatu rencana perjanjian internasional di daerah tersebut;
7. Bertugas dalam memberikan persetujuan mengenai rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. Bertugas dalam kegiatan penerimaan laporan keterangan atas pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. Bertugas dalam memberikan persetujuan yang berkaitan dengan rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang memberikan beban kepada pihak masyarakat dan daerah;
10. Bertugas dalam mengusahakan pelaksanaan tugas kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bertugas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pengawasan Keuangan Daerah**

Secara garis besar, kegiatan pengawasan adalah seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin supaya pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, aturan-aturan yang berlaku, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa: pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 100 dan 153 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD provinsi/kabupaten/kota. Dalam hal ini dapat menjelaskan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD merupakan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan APBD provinsi/kabupaten/kota dengan tujuan fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah.

Pengawasan keuangan daerah bertujuan dalam menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan objek pengawasan, sifat pengawasan, dan metode pengawasan. (Erlina, 2015: 19)

#### **4. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran**

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan kegiatan dalam mengetahui anggaran dan kemampuan dewan dalam kegiatan menyusun anggaran (RAPBD/APBD), pemeriksaan serta kegiatan identifikasi terhadap pemborosan anggaran atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudoyono, 2002 : 77). Kemampuan dalam melaksanakan tugas mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan keahliannya. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan aparatur selalu diarahkan pada arah pendidikan dan pelatihan serta bertujuan dalam memperluas pengalaman aparatur melalui studi banding ke tempat lain yang mempunyai pengalaman lebih.



Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia terdapat pada pengembangan dan peningkatan berbagai unsur sebagai berikut:

1. Bertujuan dalam kegiatan pengembangan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aparatur pemerintah, sehingga mampu memenuhi standar yang telah ditentukan untuk suatu tugas tertentu dan dapat mengambil keputusan secara mandiri dan profesional dengan berbagai pertimbangan tertentu.
2. Bertujuan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan motivasi, sikap disiplin, kejujuran, etos kerja, dan rasa tanggung jawab yang didasari oleh kesadaran masing-masing kepedulian individu.
3. Bertujuan dalam merubah sikap dan perilaku yang mengarah pada perkembangan sikap keterbukaan, sikap melayani dan perilaku mengayomi politik sebagai tugas dan tanggung jawab utamanya.

Dalam usaha meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, semua anggota dewan/DPRD harus mempunyai pengetahuan secara detail mengenai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus diketahui oleh masing-masing anggota DPRD. Pengetahuan dewan mengenai mekanisme anggaran bersumber dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari berbagai latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diikuti oleh anggota setiap dewan. Pembinaan /seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh setiap anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan hanya sekedar sebuah proses administrasi, akan tetapi juga merupakan proses politik. Hal ini dapat membuktikan bahwa anggaran

sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah sehingga kegiatan proses penentuan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh setiap anggota dewan. Adapun fungsi penganggaran menyarankan bagi setiap anggota DPRD untuk selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan proses anggaran secara masal dengan pihak eksekutif. Adapun fungsi pengawasan DPRD menjelaskan secara detail mengenai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan kinerja pihak eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam keadaan tertentu anggota DPRD disarankan secara paksa untuk mempunyai keterampilan dalam membaca anggaran serta mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

## **5. Komitmen Organisasi**

Wiener dalam Amelia Veronika (2008 : 123) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai dorongan dari pribadi masing-masing (individu) dalam melakukan hal yang berkaitan dengan usaha mencapai keberhasilan organisasi yang sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang ada pada setiap anggota dewan secara psikologis dapat mencerminkan suatu kinerja yang akan dilakukan sebagai wakil rakyat, karena pada hakikatnya komitmen organisasi yang ada bukan hanya terdapat dalam kesetiaan organisasi tetapi merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan dalam menunjukkan kepedulian diri terhadap organisasi dan prestasi kinerja yang diharapkan untuk dicapai. Komitmen organisasi anggota dewan penting untuk ditumbuh kembangkan karena sebagian besar anggota

dewan merupakan bagian dari anggota partai politik (Pramita dan Andrayani, 2010 : 45).

Menurut Robbins, (2015:73) “ *a state in which an employee identifies with a particular organization and its goal, and wishes to maintain membership in the organization.*”Komitmen organisasi menurut Gibson, Ivancevich and Donnelly (2012 : 552) adalah identifikasi rasa, keterlibatan loyalitas yang ditunjukkan oleh pekerja terhadap organisasinya atau unit organisasinya. Komitmen organisasi menunjukkan sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan sebuah organisasi. Dalam definisi tersebut dinyatakan bahwa komitmen organisasi adalah sikap loyalitas yang ditunjukkan oleh seorang pekerja pada suatu organisasi, baik dalam bentuk dukungan atas nilai-nilai dan tujuan organisasi maupun kesetiaan pada organisasi, dan hal ini mempunyai sebuah proses yang berkelanjutan.

### **III. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa Hapsari, Nur Azlina, Al azhar A dengan judul Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, Dan Political Background Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 2014-2019) yang dimuat dalam jurnal On Line Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, ISSN 2355-6854, Vol.1 No.1 tahun 2018. *This research aims to test and prove empirically the influence of the board knowledge about the budget on budget oversight with the accountability, organizational commitment, and political background as moderating variable. The population is on DPRD located in Rokan Hilir regency in 2017. The sample used as the respondents was taken by using sensus sampling method. The Questionnaires was distributed to 45 respondents, which can be processed is 42 questionnaire. Data analysis techniques to test hypotheses using simple linear*

*regression analysis and moderated regression analysis (MRA) with SPSS 21.0.*

*The results of the tests show that the board knowledge about the budget has significant affect on budget oversight. And result also prove the relationship*

*between the board knowledge about the budget with budget oversight are moderated by the accountability, organizational commitment, and political*

*background.* Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran dengan akuntabilitas, komitmen organisasi, dan latar belakang politik sebagai variabel pemoderasi. Populasinya adalah anggota DPRD yang berada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2017. Sampel yang digunakan sebagai responden diambil dengan menggunakan metode sensus sampling. Kuesioner dibagikan kepada 45 responden, yang dapat diproses adalah 42 kuesioner.

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan moderated regression analysis (MRA) dengan SPSS 21.0. Hasil tes menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran. Dan hasilnya juga membuktikan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan anggaran dimoderasi oleh akuntabilitas, komitmen organisasi, dan latar belakang politik.

#### **IV Hipotesis**

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah

H2 : Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

H3 : Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah

H4 : Komitmen anggota Dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

H5 : Pengetahuan dewan tentang anggaran, Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah dan komitmen anggota dewan secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan pengawasan anggota Dewan

## **V METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan survey secara langsung dan instrumen penelitian yang digunakan adalah menggunakan angket (kuesioner). adapun desain penelitian yang digunakan adalah survei. Pada penelitian ini membutuhkan data primer dalam bentuk persepsi responden sebagai subjek penelitian. Pengertian dari data primer diantaranya merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden (Sugiyono, 2012:308). Penelitian ini menggunakan metode survey dan metode observasi untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan. Selanjutnya agar tujuan penelitian dapat dicapai, maka data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang diperoleh dengan menggunakan bantuan software SPSS 14.0 for windows. Unit analisis penelitian ini yaitu pengetahuan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian anggaran yang berjumlah 30 Anggota. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.39 Pucang, Magersari, Kec. Sidoarjo, Jawa Timur

Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah

1. pengetahuan dewan tentang anggaran (X1).

Indikator yang digunakan menurut Ika Kinasih( 2013 : 78 ) sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan tugas
- 2) Memahami mekanisme anggaran
- 3) Memahami Fungsi penganggaran.
- 4) Memahami pengeluaran anggaran.

Selanjutnya adalah variabel yang kedua dari variabel independent

## 2. Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (X2)

Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara antara lain menyatakan bahwa:

- (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## 1. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (X3).

PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut dipersyaratkan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menghasilkan

1. laporan keuangan yang terdiri atas Neraca,
- 2.Laporan Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas,
- 3.dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya adalah variabel independent yang ke empat

## 2. Komitmen anggota Dewan

Indikator yang digunakan menurut Veronika ( 2008 ) dan Rosalina Pebrika(2012) sebagai berikut :

- 1) Mencapai keberhasilan organisasi
- 2) Mencerminkan kinerja sebagai wakil rakyat
- 3) Kesetiaan dalam berorganisasi.

Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu responden hanya menjawab dengan cara memilih salah satu jawaban yang sesuai dan yang telah disediakan. Dengan kuesioner tertutup diharapkan dapat mempermudah responden dan menghemat waktu.

Sistem penilaian yang digunakan adalah dengan Skala Likert. Menurut Sugiyono (2016 :93), "Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial". Seperti yang telah disebutkan diatas, jenis kuesioner yang digunakan berupa pertanyaan tertutup yaitu responden menjawab dengan cara memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan yang telah disediakan. Semua variabel baik variabel bebas maupun terikat telah dirinci dan untuk pengukurannya dapat diukur dengan Skala Likert dengan pembobotan nilai sebagai berikut:

1. Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) dengan bobot skor 4
2. Untuk jawaban setuju (S) dengan bobot skor 3
3. Untuk jawaban Tidak Setuju (TS) dengan bobot skor 2
4. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan bobot skor 1
5. Prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  6. (1) Menyebarkan kuesioner kepada responden.
  7. (2) Menjelaskan cara pengisian kuesioner.
  8. (3) Mengumpulkan kuesioner yang telah ditetapkan sehingga yang tidak memenuhi karakteristik tidak disertakan dalam pengolahan data.

9. (4) Mengolah dan menganalisis hasil kuesioner yang telah diseleksi sesuai dengan karakteristik populasi.

Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, atau data tersimpan di website. Data penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dengan mempelajari sumber data tertulis untuk memperoleh data sekunder mengenai struktur organisasi

## VII HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis regresi linier sederhana

**Tabel 4.8**  
**Analisis regresi linier sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.698	1.232		1.378	.175
	Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	-.179	.150	-.117	-1.192	.239
	Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	.108	.151	.064	.715	.478
	Pertanggungjawaban Laporan Keuangan	.035	.226	.015	.154	.878
	Komitmen anggota Dewan	1.168	.067	.940	17.344	.000

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan APBD

Sumber: output data SPSS versi 16 (2019)

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial antara variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$ ) dan



variabel dependen (Y). Dari hasil analisis menggunakan software SPSS versi 16 di atas maka, persamaan regresi menjadi seperti berikut:

$$Y = 1,648 + (-0,179) X_1 + 0,108 X_2 + 0,035 X_3 + 1,168 X_4$$

Dari hasil persamaan tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa :

Nilai konstanta adalah 1,648. Hal ini berarti tanpa adanya pengaruh variabel *independent* yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, pemeriksaan laporan keuangan Daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan dan komitmen anggota dewan maka nilai variabel *dependent* yaitu pengawasan keuangan APBD sebesar 1,648. Nilai koefisien regresi dari pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_1$ ) (-0,179) artinya bahwa setiap penurunan satu satuan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X), akan mengakibatkan kenaikan variabel pengawasan keuangan APBD (Y) sebesar 0,179 dengan ketentuan bahwa variabel lainnya adalah konstan. Sedangkan Nilai koefisien regresi dari pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_2$ ) (0,108) artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pemeriksaan laporan keuangan daerah ( $X_2$ ), akan mengakibatkan kenaikan variabel pengawasan keuangan APBD (Y) sebesar 0,108 dengan ketentuan bahwa variabel lainnya adalah konstan. Untuk Nilai koefisien regresi dari pertanggungjawaban jawaban laporan keuangan ( $X_3$ ) (0,035) artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pemeriksaan laporan keuangan daerah ( $X_3$ ), akan mengakibatkan kenaikan variabel pengawasan keuangan APBD (Y) sebesar 0,035 dengan ketentuan bahwa variabel lainnya adalah konstan. Begitu juga nilai koefisien regresi dari pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_4$ ) (1.168) artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel komitmen anggota dewan ( $X_4$ ), akan mengakibatkan kenaikan variabel pengawasan keuangan APBD (Y) sebesar 1,168 dengan ketentuan bahwa variabel lainnya adalah konstan

Sebelum memberi keputusan terkait uji t ini digunakan perhitungan t tabel Menurut Sarwono (2013:85) cara menghitung t tabel dengan  $\alpha = 0,05$  didapat melalui rumus berikut:

$$\frac{\alpha}{2} = 0,025 \quad DF = (\text{jumlah sampel} - 2) = (30 - 2) = 28$$

maka t tabel (0,025;28) adalah 2,04841.

Dari sini maka nilai t hitung variabel pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_1$ ) -1,192 lebih kecil dari t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi 0,239 lebih besar dari 0,05 maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Artinya ada pengaruh negatif pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD. Berdasarkan uji t di peroleh bahwa nilai signifikan diatas 0,05 Maka Hipotesis Yang Mengatakan "Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan APBD" ditolak.

Sedangkan untuk nilai t hitung variabel pemeriksaan laporan keuangan daerah ( $X_2$ ) 0,715 lebih kecil dari t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi 0,478 lebih besar dari 0,05 maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Artinya ada pengaruh yang sangat rendah pemeriksaan laporan keuangan daerah terhadap pengawasan APBD. Berdasarkan uji t di peroleh bahwa nilai signifikan diatas 0,05 Maka Hipotesis Yang Mengatakan "pemeriksaan laporan keuangan daerah Berpengaruh tapi tidak signifikan Terhadap Pengawasan Keuangan APBD".

Kemudian pada nilai t hitung variabel pertanggungjawaban laporan keuangan daerah ( $X_3$ ) 0,154 lebih kecil dari t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi 0,878 lebih besar dari 0,05 maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Artinya ada pengaruh yang sangat rendah pada pertanggungjawaban laporan keuangan daerah terhadap pengawasan APBD. Berdasarkan uji t di peroleh bahwa nilai signifikan diatas 0,05 Maka Hipotesis Yang Mengatakan "pertanggungjawaban

laporan keuangan daerah berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Pengawasan Keuangan APBD”.

Sedangkan nilai t hitung variabel komitmen anggota dewan ( $X_4$ ) 17,344 lebih besar dari t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang sangat tinggi pada komitmen anggota dewan terhadap pengawasan APBD. Berdasarkan uji t di peroleh bahwa nilai signifikan dibawah/ kurang dari 0,05 Maka Hipotesis Yang Mengatakan “komitmen anggota dewan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengawasan Keuangan APBD”.

**Tabel 4.9 Hasil Uji (R)  
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.936 <sup>a</sup>	.875	.864	1.687

a. Predictors: (Constant), Komitmen anggota Dewan, Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Laporan Keuangan, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan APBD

Sumber: output data SPSS versi 16 (2019)

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis di atas dengan *software* SPSS versi 16 didapat bahwa, pada tabel *model summary* nilai koefisien korelasi berganda adalah 0,875. Hal ini mengindikasikan bahwa antara variabel variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, pemeriksaan laporan keuangan daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan dan komitmen anggota dewan terhadap variabel dependen yaitu pengawasan APBD, memiliki hubungan positif yang sangat kuat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh

Sugiyono (2010:250) bahwa, koefisien korelasi 0,80 sampai dengan 1,000 berarti hubungan yang sangat kuat.

Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD Kabupaten Sidoarjo.

Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil dari uji t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi 0,239 lebih besar dari 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya ada pengaruh negatif pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan APBD.

Variabel pemeriksaan laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil dari uji t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi 0,478 lebih besar dari 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Pemeriksaan laporan keuangan daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap terhadap pengawasan keuangan APBD.

Variabel pertanggungjawaban laporan keuangan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil dari uji t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi 0,878 lebih besar dari 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Pertanggungjawaban laporan keuangan tidak signifikan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD.

Variabel komitmen anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil dari uji t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Komitmen anggota dewan signifikan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD.

Berdasarkan dari hasil dan uji t didapat bahwa nilai signifikan diatas 0,05 maka hipotesis yang mengatakan “Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan APBD”. Ditolak. hal ini sejalan informasi yang berkaitan dengan anggaran secara lengkap yang ternyata kurang efektif digunakan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja pemerintahan, sehingga kurang berjalan secara efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. senada dengan penelitian penelitian terdahulu yang mendukung dilakukan oleh Lina Ayu Safitri dan Shinta Permata Sari dengan judul Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah: Partisipasi Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pemoderasi yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol 7 No 2 (2018): Vol 7 No 2 Agustus 2018: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat berkontribusi besar dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Oleh karena itu, anggota dewan harus mampu memperluas pengetahuan mengenai anggaran, agar dewan dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan APBD Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemeriksaan laporan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan APBD kabupaten Sidoarjo.
3. Pertanggungjawaban laporan keuangan tidak signifikan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD kabupaten Sidoarjo.

4. Komitmen anggota dewan signifikan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD kabupaten Sidoarjo.
5. Pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran, pemeriksaan laporan keuangan daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan dan komitmen organisasi secara bersama-sama mempengaruhi terhadap pengawasan keuangan (APBD) Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pada proses penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dikemukakan oleh penulis yang terkait dengan penelitian mengenai pengetahuan dewan tentang anggaran pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderating oleh budaya organisasi, dan prinsip good governance, maka penulis beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi anggota dewan legislatif di DPRD Kabupaten Sidoarjo

Menurut hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah harus terus ditingkatkan, dengan persyaratan kualifikasi yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan akan keahlian tertentu. yang menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh negatif dan hasil pengujian menjadi berpengaruh dengan berbanding terbalik.

1. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dengan memperluas ruang lingkup penelitian, seperti penelitian per wilayah, atau ranah provinsi. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengganti subjek penelitian, seperti penelitian pada BAWASDA, dan menambah atau memodifikasi variabel pemoderating, seperti gaya kepemimpinan, psikologi dewan, pengambilan keputusan dan lain-lain.

Diharapkan pula untuk penelitian selanjutnya menggunakan pengukuran yang lebih efektif dalam melakukan pengukuran pengetahuan dewan tentang anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, 7<sup>th</sup>ed.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Godfrey, Jeyne, Tarca, Hamitondan Holmes (2010), *Accounting Theory, 7<sup>th</sup>ed*. John Wiley & Sons, Inc. (GHT).
- Halim dan Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hadin, 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Genta
- Hariadi, Restianto, Bawono. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Sopomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang *Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Noerdiawan. D., Putra, L.S., Rahmawati, M. 200. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_ Nomor 58 tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 *tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD- RI dan DPRD*. Sekretariat Negara. Jakarta.

